

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026



STASIUN PPMHKP MAMUJU

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Nasional dan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMKHP) merumuskan Visi dengan mengacu pada beberapa isu yang tertuang dalam Asta Cita antara lain yang terkait dengan:

1. Meningkatkan gizi anak melalui makanan bergizi gratis
2. Swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia
3. Hilirisasi komoditas

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Mamuju untuk mewujudkan Visi Misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2026 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju dalam jangka waktu satu tahun Anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai SPPMHKP Mamuju pada tahun 2026.

Demikian RKT SPPMHKP Mamuju Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Mamuju, Januari 2026
Kepala SPPMHKP Mamuju,




Darwis, S.Pi, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Tugas dan Peran Organisasi	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sasaran	4
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN	
2.1 Visi	5
2.2 Misi	6
2.3 Tujuan	7
2.4 Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja	8
2.4.1 Sasaran Startegis	8
2.4.2 Indikator Kinerja	15
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran	21
2.6 Kegiatan Keuangan	22
2.6.1 Anggaran	22
2.6.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	23
BAB III. PENUTUP	
Penutup	24

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal.
1	<i>Klasifikasi tugas/jabatan Pegawai di Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2026.....</i>	3
2	<i>Indikator kinerja Program Stasiun PPMHKP Mamuju tahun 2026.....</i>	18
3	<i>Anggaran Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2021 - 2026.....</i>	22
4	<i>Daftar Realisasi Penerimaan Imbalan Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pada Stasiun PPMHKP Mamuju Periode 2021– 2026.....</i>	23

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Hal.
1	Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Mamuju	3
2	Struktur Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	21
3	Struktur Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan.....	22

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka pembangunan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Kelautan dan perikanan. Peranan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument perlindungan keamanan pangan terutama produk perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan kegiatan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam membangun kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumber daya perikanan.

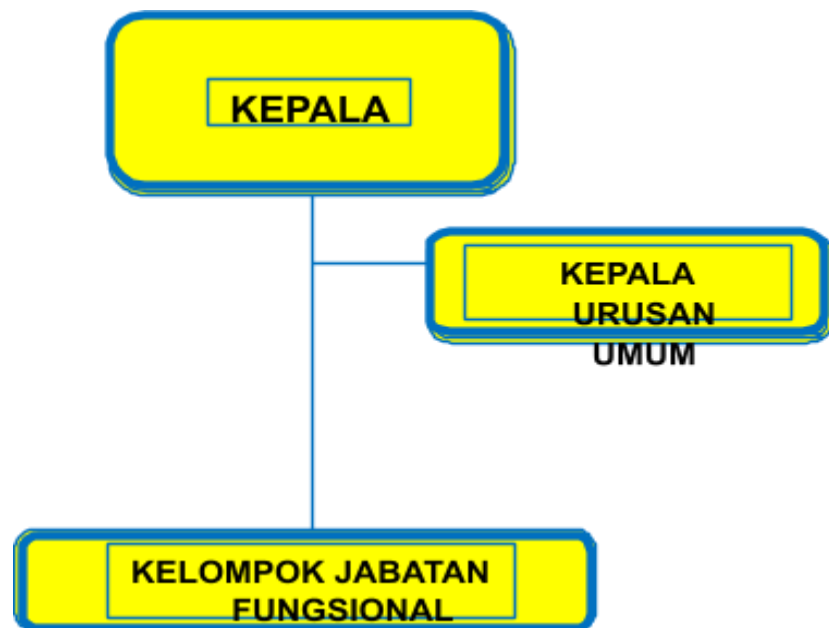
Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia, Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang menghasilkan mutu hasil budidaya yang baik, oleh karena itu BPPMHKP dituntut untuk mampu meningkatkan sistem

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan Internasional mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti : Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Kanada, Semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety Assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical control Point (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (traceability) sebagai instrument pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure” (Perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan – peraturan teknis (Khususnya keamanan pangan) Guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade) hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia penghasil Produk kelautan dan perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Mamuju dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Mamuju

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, terbagi atas tugas/jabatan masing-masing pegawai. Klasifikasi tugas/jabatan pegawai di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju dapat dilihat pada Tabel 1 :

Klasifikasi tugas/jabatan Pegawai di Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2026 .

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH
1	Struktural - Kepala UPT - Kepala Urusan Umum - Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen - Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu - Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

2	Fungsional - Inspektur Mutu Ahli muda - Inspektur Mutu Ahli Pertama - Asisten Inspektur Mutu Pelaksana	2 Orang 1 Orang 2 Orang
3	Administrasi dan Keuangan	6 Orang
4	PPPK dan PJLP	11 Orang

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan SPPMHKP Mamuju Tahun 2026 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SPPMHKP Mamuju tahun 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh SPPMHKP Mamuju pada tahun 2026.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana kinerja Tahunan Pembangunan SPPMHKP Mamuju adalah Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan SPPMHKP Mamuju Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP Mamuju tahun 2026-2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL) SPPMHKP Mamuju Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BPPMHKP Mamuju pada tahun 2026.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. VISI

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah visi Indonesia 2026-2029 yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang merupakan dasar dari visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2026. Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab kegiatan dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2026-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

BPPMHKP sebagai eselon I dari KKP memiliki visi sesuai dengan Visi KKP 2026 yaitu mendukung visi Presiden dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Maka Stasiun PPMHKP Mamuju sebagai pelaksana visi tersebut di wilayah kerjanya yaitu di Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**.

2.2 MISI

Terdapat 7 (tujuh) misi dari 8 (delapan) misi Presiden yang dilaksanakan oleh KKP yaitu :

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

Misi BPPMHKP adalah menjalankan misi Kementerian kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, BPPMHKP menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta melaksanakan fungsi

yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang mengacu pada RPJMN 2026-2029 menjadi dasar bagi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan yang terfokus pada penguatan sektor maritim, reformasi struktural, serta peningkatan kualitas SDM, target pembangunan nasional diharapkan dapat dicapai secara optimal. Peran KKP dalam mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi biru menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan yaitu pada peningkatan mutu produk perikanan, BPPMHKP melaksanakan 4 program yaitu:

1. Program Manajemen Mutu
2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer
3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen
4. Program Dukungan Manajemen.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di daerah, maka misi BPPMHKP dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Mamuju yang selaras tentunya dengan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Stasiun PPMHKP Mamuju:

1. Mewujudkan produk perikanan Sulawesi Barat yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Meningkatkan standar pengujian dan jaminan kualitas hasil perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.
4. Melaksanakan sertifikasi mutu bagi unit usaha produksi primer serta peningkatan layanan manajerial, penguatan kerja sama lintas sektor, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan SDM.

2.3 TUJUAN

Tujuan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Stasiun PPMHKP Mamuju melaksanakan tujuan yang hendak dicapai BPPMHKP adalah **meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Barat serta menjamin mutu hasil perikanannya** dengan sasaran:

1. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Sulawesi Barat
2. Meningkatnya keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Barat
4. Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Sulawesi Barat
5. Meningkatnya sertifikasi mutu baik produksi primer maupun pascapanen
6. Meningkatkan pengawasan mutu produk perikanan.

Strategi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan mutu produk melalui empat langkah utama. Manajemen Mutu ditingkatkan dengan standar laboratorium, sistem jaminan mutu, dan optimalisasi quality assurance guna memastikan daya saing produk perikanan di pasar global. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer diperkuat melalui sertifikasi unit usaha, validasi lembaga, serta kebijakan teknis yang memastikan standar kualitas sejak tahap awal produksi. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen menekankan sistem traceability, sarana pengujian, serta pengawasan ketat untuk menjaga keamanan dan transparansi rantai pasok.

2.4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.4.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Adapun sasaran kegiatan terkait fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun PPMHKP Mamuju yang merupakan penjabaran dari Sasaran BPPMHKP sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, dan lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen serta Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor.
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju (%)
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju (%)
2. Sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar adalah kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Stasiun PPMHKP Mamuju dan kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:

- 1) Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 2 laporan dari tahun 2026 hingga tahun 2026.
- 2) Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 1 unit pada tahun 2026 hingga tahun 2026.
- 3) Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 0 lokasi pada tahun 2026.
- 4) Penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability*.
- 5) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di wilayah RI, 100% pada tahun 2026 hingga tahun 2026.
- 6) Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2026 hingga tahun 2026.
- 7) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP.
- 8) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor.
- 9) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).
- 10) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor.
- 11) Menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO.
- 12) Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official

Control) Lingkup Otoritas Kompeten.

- 13) Sasaran jumlah unit pelaksana teknis BPPMHKP yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025).
 - 14) Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
 - 15) Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, dengan indikator: Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik.
3. Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di BPPMHKP, dengan indikator kinerja:
- a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai) dari 92% pada tahun 2025 menjadi 92.1 % pada tahun 2026.
 - b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai) dari 71 % pada tahun 2025 menjadi 71.75 % tahun 2026
 - c. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks dari 82 % pada tahun 2025 menjadi 82,5% pada tahun 2026.
 - d. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai) dari 86% pada tahun 2025 Menjadi 86,2% tahun 2026
 - e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (%) dari 86% pada tahun 2025 Menjadi 86% Tahun 2026
 - f. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (%) dari 76% pada tahun 2025 menjadi 77% pada tahun 2026.

- g. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (%) 70 Persen pada tahun 2025 menjadi 77 Persen tahun 2026
- h. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai) 86% tahun 2025 Menjadi 89 Tahun 2026

Perencanaan Kinerja adalah integrasi antara keahlian sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan kegiatan organisasi. Dengan perencanaan kinerja, suatu instansi pemerintah dapat memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya secara efisien, efektif dan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan sehingga mampu bertahan dalam lingkungan sesuai kondisi saat ini. Proses ini menghasilkan suatu rencana kegiatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan adanya perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dapat mengatasi perubahan secara adaptif;
2. Perencanaan kegiatan akan menuntun organisasi untuk menyusun strategi yang berorientasi pada hasil melalui optimalisasi kapabilitas dan sumberdaya yang dimilikinya;
3. Memungkinkan organisasi dapat memberikan komitmen pada kegiatan masa depan;
4. Organisasi dapat lebih Proaktif;
5. Organisasi dapat lebih memberikan pelayanan prima;
6. Mengetahui kelemahan-kelemahan dan hambatan organisasi sehingga dapat diperbaiki untuk tahun yang akan datang.

Sasaran kegiatan juga adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Stasiun PPMHKP Mamuju yang merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan BPPMHKP melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya.

Derasnya arus teknologi informasi dan promosi sebagai dampak globalisasi, meningkatkan wawasan iptek, serta sikap masyarakat yang kritis menuntut transparansi dan profesionalisme Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk lebih tanggap dan cermat dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan perikanan yang selama ini berfokus pada pendekatan usaha perikanan dan kelautan. Dengan demikian diperlukan penataan kembali penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan pendekatan ke sistem yang komprehensif berorientasi kepada pembangunan usaha perikanan dan kelautan.

Dalam kaitan globalisasi dan liberisasi perdagangan, petugas dituntut untuk memberikan rasa percaya kepada mitra dan pengguna jasa terhadap pelayanan jasa sertifikasi produk perikanan, pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam perkembangannya, kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki peningkatan fungsi dan peranan sebagai kegiatan pengendalian mutu produk perikanan agar aman dikonsumsi sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan produk serta kegiatan perikanan Indonesia pada persaingan pasar yang semakin terbuka.

Keberadaan Stasiun PPMHKP Mamuju di Sulawesi Barat disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pengertian dan kemauan para pemakai jasa/pelaku usaha dari berbagai lapisan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk melakukan sertifikasi dan pengawasan unit usaha sebagai jaminan mutu ikan/produk perikanan yang akan dipasarkan. Untuk memenuhi/ melayani keinginan para pengguna jasa maka pelayanan terus ditingkatkan tiap tahunnya berdasarkan pada Standar Pelayanan Stasiun PPMHKP Mamuju.

Untuk mewujudkan sistem yang tangguh, berbasiskan peraturan perundang-undangan yang kuat dalam suatu organisasi

yang kompatibel untuk mencapai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka ditetapkan sasaran kegiatan Stasiun PPMHKP Mamuju, yaitu :

1. Masyarakat kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang meningkat kesejahteraannya.
2. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat di Sulawesi Barat.
3. Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dan berdaya saing di Sulawesi Barat.
4. Tersedianya kebijakan yang berkualitas.
5. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang handal di Sulawesi Barat.
6. Tersedianya SDM, sarana, teknologi yang berdaya saing.
7. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu secara profesional dan partisipatif.
8. Aparatur Sipil Negara Stasiun PPMHKP Mamuju yang profesional.
9. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang andal.
10. Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
11. Pengelolaan anggaran Stasiun PPMHKP Mamuju yang berkualitas.

2.4.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2026. Indikator Kinerja SPPMHKP seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator kinerja Program Stasiun PPMHKP Mamuju tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MAMUJU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Mamuju	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.033.612.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	44.717.000
3	Manajemen Mutu	80.000.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2026		3.483.665.000

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi, Adapun kegiatan dalam program pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
3. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
5. Pengembangan dan Penerapan sistem Jaminan Mutu Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai standar dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleh meningkatnya hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung jaminan mutu pangan dari hulu ke hilir.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia, Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu, pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen mutu, mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan Pengawasan dan pengendalian mutu Keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia, dan negara importir lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan terselusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak / ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

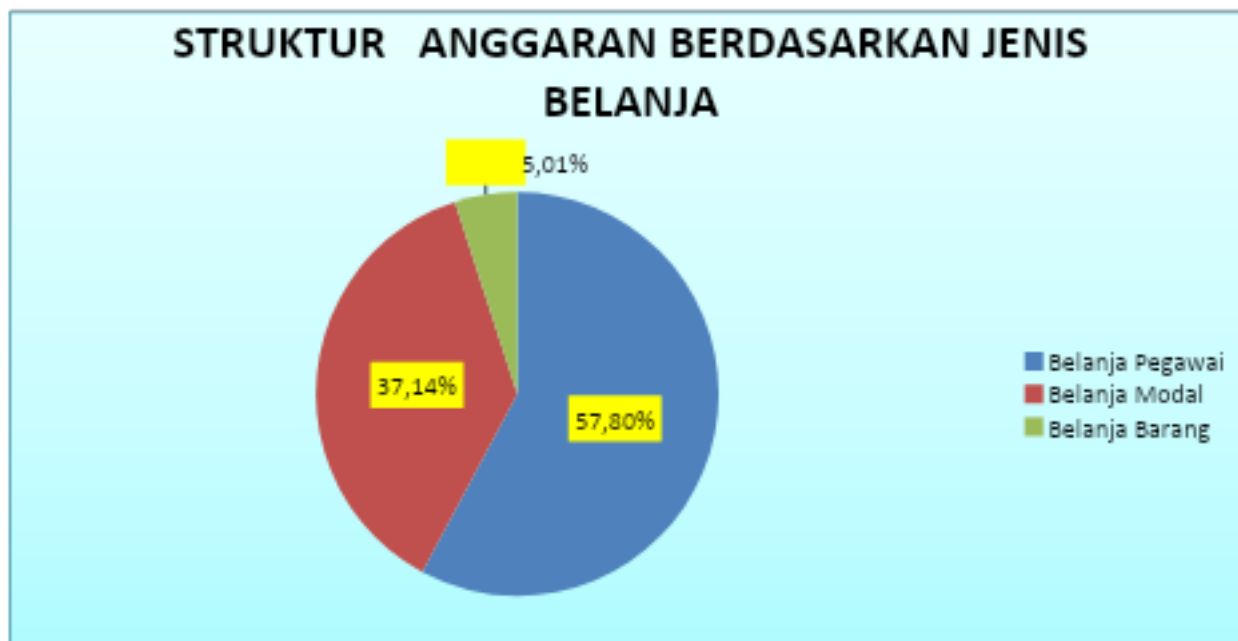
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran BPPMHKP Mamuju

Rencana kerja dan anggaran BPPMHKP Mamuju tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pengendalian mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja SPPMHKP Mamuju

dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan perikanan. Alokasi anggaran pengendalian Pengawasan mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. **3.483.665.000,-** Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Pengawasan pengendalian mutu dan Keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun PPMHKP Mamuju untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien, dan akuntabel.

Alokasi Anggaran per kegiatan pada program pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut :

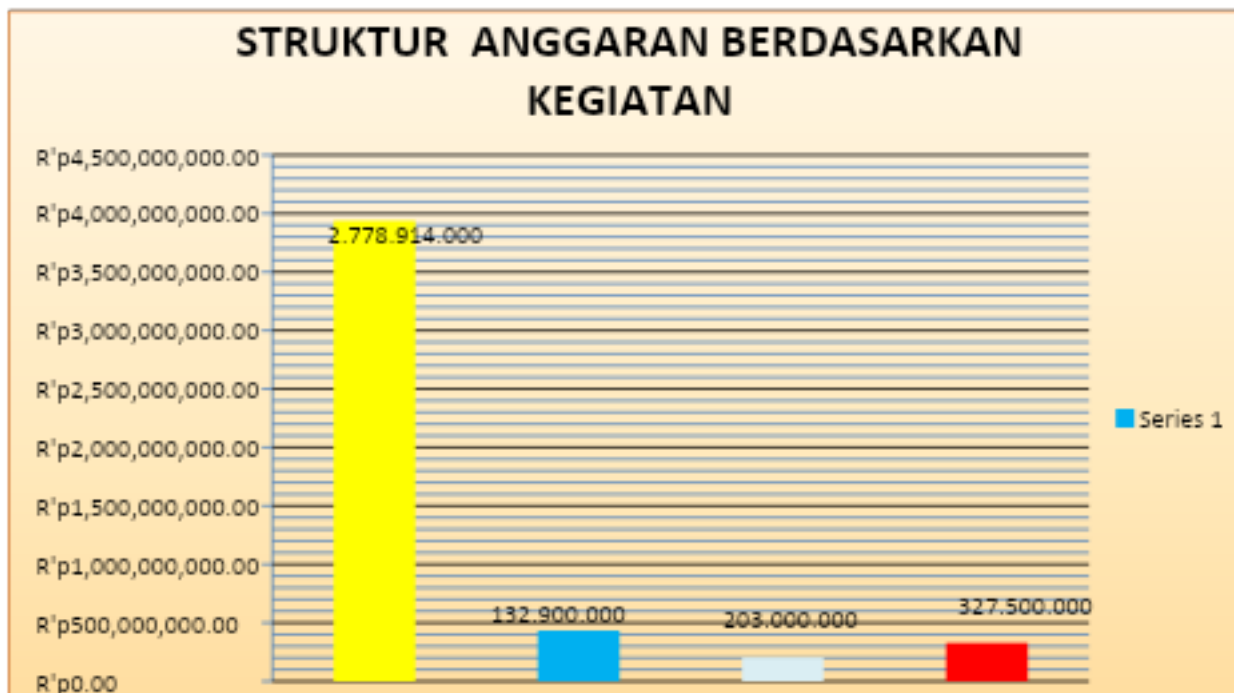


2.6 Kegiatan Keuangan

2.6.1 Anggaran

Stasiun PPMHKP Mamuju pada Tahun anggaran 2022 s/d 2026 melalui DIPA mendapat alokasi anggaran seperti yang tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2022 - 2026



NO	T A H U N	ANGGARAN (Rp)
1	2022	4.175.484.000
2	2023	4.905.696.000
3	2024	3.439.710.000
4	2025	3.484.031.000
5	2026	3.483.665.000

Melihat tabel yang ada dari tahun 2022 s/d 2026 maka alokasi anggaran yang diterima SPPMHKP Mamuju hampir tiap tahun mengalami penurunan. Tetapi masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan kegiatan perkarantinaaan dan mutu ini disebabkan oleh perubahan lingkungan kegiatan yang sangat pesat dan akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, otonomisasi daerah dan arah kebijakan pembangunan sistem dan usaha perikanan. Untuk meningkatkan tuntutan masyarakat atas pelayanan prima dari

aparatus pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dan pelayanan yang diberikan harus dapat memberikan kepuasan publik yang dilayani.

Bentuk hambatan lain yang mempengaruhi sistem jaminan mutu antara lain akses pasar seperti tarif, kuota, proteksi, subsidi, inilah yang harus disikapi oleh SPPMHKP dalam mengalokasikan anggaran pada tiap-tiap UPT di seluruh Indonesia.

2.6.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target Penerimaan Negara Bukan pajak Tahun Anggaran 2026 pada Stasiun PPMHKP Mamuju sebesar Rp. 18.000.000,- Seluruh penerimaan imbalan jasa Pengendalian dan pengawasan mutu dari tahun sebelumnya telah disetorkan pada rekening Kas Negara.

Tabel 2. *Daftar Realisasi Penerimaan Imbalan Jasa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Stasiun PPMHKP Mamuju 2023 – 2026*

NO	Tahun	Target PNBP	Realisasi Target PNBP
1	2023	4.500.000	25.106.746
2	2024	15.000.000	16.814.999
3	2025	17.010.000	719.746
4	2026	18.000.000	3.006.000

BAB III. PENUTUP

Program kerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju pada TA. 2026 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan, Pelaksanaan program BPPMHKP ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor, dan antar area
3. Terwujudnya pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggung jawab , dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem Jaminan mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem Jaminan mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara SPPMHKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan SPPMHKP Mamuju yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi SPPMHKP yang efektif, efesien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan SPPMHKP Mamuju secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran pembangunan SPPMHKP Mamuju pada tahun 2026 sebesar Rp. **3.483.665.000,-** Alokasi Anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 3.033.612.000,-
2. Program Pengendalian dan Pengawasan mutu Rp. 44.717.000,-
3. Manajemen Mutu Rp. 80.000.000,-

Demikian Rencana Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan TA. 2026 dalam mewujudkan “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”.